

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG
UPAYA PEMBATALAN AKTA HIBAH ATAS TUNTUTAN AHLI WARIS
(Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa
No. Perkara 734/Pdt.G/2012/PA/Sgm)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar.**

Oleh:

**ABDUL GOFUR
NIM: 10100112012**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdul Gofur
Nim : 10100112012
Tempat/tgl.Lahir : Manokwari, 21 Januari 1994
Jur/prodi : Peradilan Agama
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jl. Berua 2 kel. Paccerakkang, kec. biringkanaya
Judul : Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa
Tentang Upaya Pembatalan Akta Hibah Atas Tuntutan
Ahli Waris (Studi Kasus Pengadilan Agama
Sungguminasa No. Perkara 734/Pdt.G/2012/PA/Sgm.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 09 Maret 2018
Penyusun

Abdul Gofur
NIM:10100112012

PENGESAHAN SKRIPSI




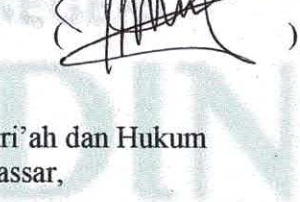
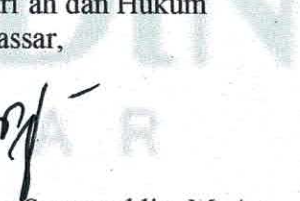
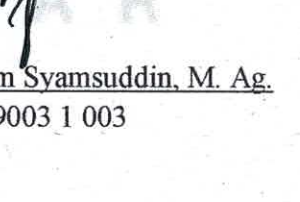
Skripsi yang berjudul, “ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG UPAYA PEMBATALAN AKTA HIBAH ATAS TUNTUTAN AHLI WARIS (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa No. Perkara 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm)”, yang disusun oleh Abdul Gofur, NIM: 10100112012, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 4 September 2018 M

23 Dzulhijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
Sekretaris : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.
Munaqisy I : Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.Ag.
Munaqisy II : Drs. Muh. Jamal Jamil, M.Ag.
Pembimbing I : Dr. H. Supardin, M.H.I.
Pembimbing II : Dr. Hj. Patimah, M.Ag.

()
()
()
()
()
()

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag.
NIP. 1962 1016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikumWr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Allah swt, karena atas berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Upaya Pembatalan Akta Hibah Atas Tuntutan Ahli Waris (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa No. Perkara 734/Pdt.G/2012/PA/Sgm)” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang disertai dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian, penulis pun menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moriil maupun materiil demi terwujudnya skripsi ini, yakni kepada :

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar dan Segenap Pembantu Rektor yang memberikan kesempatan mengecap getirnya kehidupan kampus UIN, sehingga penulis merasa diri sebagai warga kampus insan akademisi.
2. Prof. Dr. Darusalam, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. serta Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Dr. H. Supardin, M.H.I beserta ibu Dr. Hj. Fatimah, M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan, sekaligus sebagai Pembimbing I dan Pembing II yang selalu meluangkan waktunya untuk mengarahkan serta membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak/Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum serta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memberi petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan mata kuliah dan skripsi ini.
5. Segenap Dosen-dosen Jurusan Peradilan Agama yang telah mendidik, membimbing, mengajar dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang telah mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi kami di dunia dan di akhirat. Aamiin.
6. Bapak ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 A dan jajarannya yang telah banyak membantu dan memberi petunjuk dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Serta seluruh teman-teman Peradilan Agama angkatan 2012 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sedikit banyaknya memberikan ide dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat berkembang.
8. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang membantu yang selalu setia menemani selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dan meyakini bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan bimbingan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi penulis agar nantinya penulis lebih baik lagi dalam menyajikan suatu pembahasan.

Amiinn Yaarobbal Alam Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah swt, senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktifitas kita semua. Amin.

Akhir kata Billahitaufiqwalhidayah

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Samata , 08 Maret 2018
Penyusun

Abdul Gofur
NIM: 10100112012

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1-10
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	11-34
A. Tinjauan Hukum Tentang Putusan Pengadilan Agama	11
1. Pengertian Putusan.....	11
2. Sumber Hukum Putusan Pengadilan Agama	11
3. Bentuk Putusan Pengadilan Agama	12
4. Asas Putusan Pengadilan Agama.....	14
5. Kekuatan Suatu Putusan	15
B. Tinjauan tentang Hakim Pengadilan.....	16
C. Tinjauan tentang Hibah.....	18
1. Pengertian Hibah	18
2. Dasar Hukum Hibah	25
3. Rukun dan Syarat Hibah	26
D. Tinjauan tentang Ahli Waris.....	29
1. Kelompok Utama Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam.....	29

2. Syarat Menjadi Ahli Waris	31
3. Tidak Pantas Menjadi Ahli Waris.....	33
4. Hubungannya dengan Hukum Waris Nasional.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35-39
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Data	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Instrumen Penelitian	38
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	38
G. Pengujian Keabsahan Data	39
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	40-63
A. Tinjauan Umum Peradilan Agama di Indonesia.....	40
B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungguminasa.....	44
C. Hal-hal yang Mendasari Keterkaitan Hukum Hibah Dan Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Islam	47
D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm	50
E. Analisis Putusan Hakim.....	60
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	esdan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d\	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	a	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
اُ	<i>Dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu-tah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَاوْدَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madinah al-fadilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>



ABSTRAK

Nama : Abdul Gofur

Nim : 10100112012

Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Upaya Pembatalan Akta Hibah Atas Tuntutan Ahli Waris (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa No. Perkara 734/Pdt.G/2012/PA/Sgm)

Penelitian mengenai “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Upaya Pembatalan Akta Hibah Atas Tuntutan Ahli Waris (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa No. Perkara 734/Pdt.G/2012/PA/Sgm.)”, bertujuan untuk mengetahui hubungan antara hukum hibah dan hukum waris. Serta untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan pembatalan akta hibah.

Apabila kita merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VI Pasal 212 tentang hibah bahwa “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Namun perkara dengan No. 734/Pdt.G/2012/PA/Sgm menunjukkan adanya upaya pembatalan akta hibah yang dilakukan oleh ahli waris selain dari yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 212, dan disini penulis melihat adanya hubungan atau keterkaitan antara hukum hibah dan hukum waris.

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan agama mengenai pembatalan akta hibah atas tuntutan ahli waris.

Setelah melakukan penelitian, maka diperoleh hasil bahwa dalam perkara dengan Nomor 734/Pdt.G/2012/PA/Sgm majelis hakim telah mempertimbangkan dan memutuskan untuk menolak gugatan pembatalan akta hibah yang diajukan oleh para penggugat dengan alasan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan atas obyek yang disengketakan, hal ini sesuai dengan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, yaitu “Jika dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka penggugat wajib membuktikan, sedang tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya” dengan kata lain, kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolak gugatan karena tidak ada bukti yang membenarkan. Terkait dengan pembuktian dalam persidangan Allah berfirman dalam QS An-Naml Ayat 64 "Unjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu memang orang-orang yang benar".

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan muamalah antar sesama umat Islam diatur dalam hukum Islam, meskipun Indonesia bukan negara berdasarkan hukum Islam, namun hukum perdata di Indonesia berlaku lebih dari satu sistem Hukum Perdata, yaitu Hukum Perdata Barat (Hukum Perdata Eropa), Hukum Perdata Adat dan Hukum Perdata Islam, sehingga jika terjadi sengketa dalam hal muamalah antar umat Islam disediakan pengadilan tersendiri untuk menyelesaikannya, yakni Pengadilan Agama berdasarkan kewenangan yang telah di berikan didalam Pasal 49 ayat (1) UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa , memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam, dibidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infak
8. Sadaqah
9. Ekonomi syariah.

Salah satu jenis muamalah yang yang dianjurkan dalam Islam sebagai agama rahmatan lil alamin adalah hibah. Hukum hibah adalah diperbolehkan bahkan dianjurkan, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

Tolong menolonglah kamu atas kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong atas sesuatu dosa dan pelanggaran”¹.

Kemudian Allah juga berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 177

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahnya :

Dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa².

Saling memberi merupakan anjuran dalam Islam, agar timbul rasa persaudaraan dan saling mencintai antara sesama kaum muslimin. Sebagaimana

Rasulullah pernah bersabda:

تَحَابُّوا تَهَادُّوا

Artinya :

¹ Kementrian Agama Republik Indonesia , *Al-Quran dan Terjemahannya*, (PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 106.

² Kementrian Agama Republik Indonesia , *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 27.

saling memberi hadiahlah kamu sekalian niscaya kamu akan mencintai.(HR. Al – Bukhari)³.

Adapun definisi Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171:

“Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”⁴.

Menurut beberapa mazhab hibah diartikan sebagai berikut⁵:

- a. Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi (menurut madzhab Hanafi).
- b. Memberikan hak sesuatu materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. Hibah menurut mazhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata-mata untuk meminta ridha Allah megharapkan pahalanya. Menurut mazhab Maliki ini dinamakan sedekah.
- c. Pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qobul pada waktu sipemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapat pahala dari Allah karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya. (menurut madzhab Syafi'i).

³ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Al-San'Any, Subullus Salam, diterjemahkan oleh Muhammad Isnain Dkk (Jakarta, Darussunnah, 2011), h.555.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (cet.Ke I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) h. 156.

⁵ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, 1994, h. 145-146.

Hibah dapat dilakukan kepada orang lain tak terkecuali kepada keluarga sendiri. Di dalam hubungan keluarga, sudah menjadi hal biasa jika orang tua memberikan hadiah kepada anaknya, sebagai bentuk rasa kasih sayang. Bahkan jika melihat fenomena praktek dalam masyarakat saat ini, banyak kepala keluarga yang mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan pre-emptive (mendahului) semasa masih hidup mereka yakni menghibahkan sebagian besar harta yang dimilikinya kepada anak anaknya, dimana masing-masing mereka mendapat bagian-bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelaminnya, namun yang menjadi permasalahan, jika terjadi peristiwa hukum, yaitu meninggalnya si penghibah yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu pengurusan hak-hak dan kewajiban oleh ahli waris terkadang tidak sedikit yang menimbulkan iri hati bahkan perpecahan dalam keluarga.

Hal ini dapat dilihat dalam perkara yang di tujukan kepada Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register perkara No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm. Adapun duduk perkara yakni :

1. Pada Tanggal 6 Februari Tahun 2005 alm. Bau Patta Bt. Tunru alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau dinyatakan telah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak pernah kawin dan memiliki empat orang saudara yakni:
 - Hj. Andi Gagga binti Tunru Dg. Rani
 - Hj. Andi Bunga Sutra binti Tunru Dg. Rani
 - Hj. Andi Sima binti Tunru Dg. Rani
 - Hj. Andi Fauziah binti Tunru Dg. Rani
2. Bahwa ke empat saudara kandung alm. Bau Patta Bt. Tunru alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau tersebut, telah meninggal dunia adalah alm. Hj. Andi Sima binti Tunru Dg. Rani pada tanggal 20 Februari 2002, sehingga saudara kandung alm. Bau Bt. Tunru alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau yang

masih hidup saat ini adalah tiga orang (penggugat) dan merupakan ahli waris dari alm. Bau Patta Bt. Tunru alias Hj. Andi Hafsa Petta Bau berdasarkan surat pernyataan Ahli Waris Tanggal 15 Maret 2005.

3. Bahwa alm. Bau Patta Bt. Tunru alias Hj. Andi Hafsa Petta Bau telah meninggalkan sebidang tanah seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Tombolo (dahulu kelurahan Katangka), Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, atau yang dikenal dengan Rincik/Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia Persil No. 6 S11 Kohir No. 561 CI atas nama: Bau Patta binti Tunru Dg. Rani
4. Bahwa tanah peninggalan alm. Bau Patta binti Tunru Dg. Rani alias Hj. Andi Hafsa Petta Bau seharusnya menjadi warisan dari pada Penggugat, namun Pada tahun 1989, tanah tersebut dihibahkan seluruhnya oleh orang tuanya yang bernama alm. Haji Andi Tunru kepada alm. Andi Mansyur, sebagaimana dalam Akta Hibah No. 091/KIK/III/1989 Tanggal 17 Maret 1989, yang dibuat dihadapan Drs. Hyder Hamdjah, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Somba Opu
5. Bahwa alm. Haji Andi Tunru telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1991. Demikian pula halnya alm. Andi Mansyur telah meninggal dunia pada tahun 2001, dan alm. Andi Mansyur telah meninggalkan segenap ahli waris yakni tergugat I s/d tergugat XI.
 - Sarah Ferninandus (janda alm. H. Andi Mansyur)
 - Muhammad Danial, S.Sos Bin H. Andi Mansyur
 - Rosdiati Binti H. Andi Mansyur
 - Rosniati Binti H. Andi Mansyur
 - Murniati Binti H. Andi Mansyur
 - St. Harfiyah Binti H. Andi Mansyur

- Marla Mansyur Binti H. Andi Mansyur
- Marwan Mansyur Bin H. Andi Mansyur
- Alfian Mansyur Bin H. Andi Mansyur
- Rita Mansyur Binti H. Andi Mansyur
- Gunawan Mansyur Bin H. Andi Mansyur

Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan yang telah diajukan oleh penggugat, maka para penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dan menyatakan bahwa Akta Hibah No.091/K10/KIK/III/1989 Tanggal 17 Maret 1989, yang dibuat dihadapan Drs. Hyder Hamdjah, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Somba Opu antara alm. Haji Andi Tunru kepada alm. Andi Mansyur adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apabila kita merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VI Pasal 212 tentang hibah bahwa “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”⁶. hal ini menunjukkan bahwa kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu pada anaknya. Namun perkara di atas menunjukkan adanya upaya pembatalan akta hibah yang dilakukan oleh ahli waris selain dari yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 212, dan disini penulis melihat adanya hubungan atau keterkaitan antara hukum hibah dan hukum waris. Oleh karenanya, penulis dalam penyusunan skripsi ini tertarik mengambil judul **“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Upaya Pembatalan Akta Hibah Atas Tuntutan Ahli Waris (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa No. Perkara 734/Pdt.G/2012/PA/Sgm)”**

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Presada, 200), h. 467.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Identifikasi dan pembahasan masalah disini digunakan penulis untuk memberikan batasan masalah yang akan dikaji atau diteliti. agar penelitian ini tidak melenceng dari pokok pembahasan, maka penulis memberikan batasan masalah yaitu lebih memfokuskan terhadap bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan Nomor Register Perkara 734/Pdt.G/2012/PA/Sgm. Untuk menjelaskan konsep-konsep atau memberikan batasan masalah ada beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, adapun istilah yang dimaksud adalah:

No	istilah	Deskripsi
1	Hibah	Hibah secara bahasa berarti pemberian. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan apa-apa sebagai tanda kasih sayang. Jadi hibah adalah suatu pemberian yang dilakukan, baik dalam lingkungan keluarga maupun dengan orang lain yang dilakukan ketika masih hidup atau penghibah itu masih hidup.
2	Hukum Waris	Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang sudah meninggal dunia, diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat lain.
3	Pengadilan Agama	Pengadilan agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara

		tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.
--	--	--

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dalam beberapa point, yaitu:

1. Bagaimana keterkaitan hukum waris dan hukum hibah dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan akta hibah terhadap Perkara No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm?

D. Kajian Pustaka

Untuk memudahkan penulis dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini penulis mengambil bahan penunjang dan pembanding dari beberapa buku dan literatur-literatur yaitu:

Abdul Ghofur Anshori dengan buku yang berjudul “Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia” Tahun 2010, dalam buku ini banyak dijelaskan tentang pengertian, fungsi, syarat, dan tata cara hibah, Baik dari segi kompilasi hukum islam (KHI), hukum adat, hukum perdata, dan hukum positif semua dirangkum dalam konteks Indonesia sehingga buku ini sangat bermanfaat bagi penulis agar kiranya dapat membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi, (Gadjah Madah University Press).

M. Yahya Harahap dengan buku yang berjudul “Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama” Tahun 2007, buku ini menjelaskan tentang sistem Peradilan di Indonesia, baik itu dari segi kewenangan, fungsi, serta struktur

organisasi lembaga peradilan khususnya Peradilan Agama, sehingga buku ini sangat berguna bagi penulis untuk menambah wawasan mengenai fungsi Pengadilan Agama yang nantinya melengkapi penulisan skripsi ini (Sinar Grafika).

Soedharyo Soimin dengan buku yang berjudul “Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat” Tahun 2010, buku ini berusaha memadukan teori-teori maupun dalam praktek keseharian mengenai berbagai aspek hukum orang dan keluarga yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, sehingga buku ini merupakan rangkuman berbagai masalah hukum tentang orang yang dipandang dari aspek-aspek hukum yang berlaku, yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, maupun Hukum Perdata Barat/BW serta aspek perkembangannya dalam Yurisprudensi, sehingga dalam buku ini bahasanya pun mudah dipahami bagi mereka yang awam hukum atau mereka yang ingin memahami hukum (Sinar Grafika).

Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H.dengan buku yang berjudul “Hukum Islam”

Jurnal yang berjudul “Analisis hak pencabutan kembali atas hibah yang telah diberikan orang tua kepada anak dalam hukum islam (Kajian atas putusan mahkamah agung Nomor 78K/AG/2012)” karya Nurul Bisyarati dan Agus Rianto dalam jurnal dijelaskan tentang bagaimana hakim mahkamah agung dalam memutuskan perkara Nomor 78K/AG/2012, mengingat hibah yang merupakan salah satu bentuk hubungan sosial kemasyarakatan telah diatur secara jelas dan rinci dalam kitab fiqh muamalah yang berpedoman pada al-Qur“an dan al-Hadist dan kini telah dipositifisasi dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), demikian pula hukum positif lainnya khususnya KUHPperdata. Islam mengizinkan seseorang memberikan sebagai hadiah semua harta miliknya ketika masih hidup,

tetapi perlu diingat juga dalam pemberian harus ada sifat keadilan. Dalam pemberian hibah juga demikian.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui keterkaitan hukum waris dan hukum hibah dalam perspektif hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui bahwa putusan di pengadilan Agama sungguminasa dalam perkara No.734/Pdt.G/2012/PA.Sgm tentang pembatalan akta hibah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak sesuai.

2. Manfaat penelitian

a. Secara teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum waris barat, hukum waris adat dan hukum waris Islam mengenai pelaksanaan pembatalan akta hibah.

b. Secara praktis

1. Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
2. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti, Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai aspek hukumnya, terutama hukum islam dan berguna bagi pihak yang berminat pada masalah yang sama.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Hukum tentang Putusan Pengadilan Agama

1. Pengertian Putusan

Putusan disebut vonnis (Belanda) atau al-Qada'u (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk Pengadilan semacam ini bisa diistilahkan dengan produk Peradilan yang sesungguhnya atau *Jurisdictio contentiosa*. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan dalam suatu perkara⁷.

2. Sumber Hukum Putusan Pengadilan Agama

Dalam dunia pengadilan termasuk lingkungan pengadilan agama di Indonesia, sumber hukum yang dipakai atau dirujuk dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara secara garis besar terbagi dua, pertama, Sumber Hukum Materil; kedua, Sumber Hukum Formil yang sering disebut Hukum Acara⁸.

a. Hukum Materil Peradilan Agama

Hukum Materil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fikih, yang sudah barang tentu rentan terhadap perbedaan. Terlebih bagi bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh bangsa

⁷ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2011), h. 211.

⁸ Irfan Idris, *prospek peradilan agama sebagai peradilan negara dan peradilan keluarga dalam sistem politik hukum nasional* (cet ke I; Makassar: Alauddin university press, 2012), h. 105.

asing yang bukan hanya berpengaruh terhadap politik pemerintah dan ekonomi, tetapi juga terhadap Agama.

Sebagaimana sifatnya, fikih itu sangat toleran terhadap hukum yang berkembang di sekelilingnya dengan kata lain fikih sangat toleran terhadap situasi dan kondisi yang melingkupi, sehingga lahir kaidah: *Al- Hukmu Yaduru Ma'a Ilatihi Wujudan Wa Adaman*, bahwa hukum itu akan beredar sesuai dengan ada atau tidaknya alasan. Kemudian Ibn Qayyim mengemukakan kaidah yang semakna, yaitu: hukum berubah dengan adanya perubahan waktu dan tempat⁹.

b. Hukum Formil Peradilan Agama

Meskipun lembaga Peradilan Agama di Jawa dan Madura telah dibentuk oleh Pemerintah Belanda dengan Stbl. 1882 No. 152 jo. Stbl. 1937 No. 116 dan 610, di Kalimantan Selatan dengan Stbl. 1937 No. 638 dan 639, kemudian setelah Kemerdekaan RI, pemerintah membentuk Peradilan Agama di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan dengan PP No. 45 Tahun 1957, tetapi dalam peraturan tersebut tidak disinggung sama sekali tentang hukum acara yang harus digunakan oleh hakim dalam memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena tidak ada ketentuan resmi tentang hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, maka para hakim dalam mengadili perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama mengambil inti sari hukum acara yang ada dalam kitab-kitab fikih yang dalam penerapannya berbeda antara satu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama yang lain.

3. Bentuk Putusan Pengadilan Agama

Untuk mengetahui bentuk putusan Pengadilan Agama dapat merujuk kepada ketentuan pasal 57 ayat (2), pasal 59 ayat (2), pasal 60, pasal 61, pasal 62,

⁹ Irfan Idris, *prospek peradilan agama sebagai peradilan negara dan peradilan keluarga dalam sistem politik hukum nasional*, h. 108.

pasal 63, dan pasal 64. Dari ketentuan-ketentuan pasal inilah dapat diketahui bahwa bentuk produk keputusan yang dapat dijatuhkan Pengadilan Agama terdiri dari¹⁰:

a. Bentuk Penetapan

Penetapan disebut al-isbat (Arab) atau beschikking (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan Peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdictio voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya, karena di sana hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak memiliki perkara dengan lawan¹¹. Kapan suatu putusan Pengadilan Agama disebut berbentuk penetapan ditegaskan dalam penjelasan 60. Menurut penjelasan ini yang disebut dengan penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan. Jadi, bentuk putusan penetapan berkaitan erat dengan sifat atau corak gugat. Putusan penetapan menyesuaikan diri dengan sifat gugat permohonan. Gugat permohonan disederajatkan ekuivalensinya dengan penetapan. Dengan kata lain, Undang-undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut *beschikking* dalam arti luas.

b. Bentuk Putusan

Bentuk keputusan Pengadilan Agama yang lain ialah Putusan . yang dimaksud dengan keputusan yang berbentuk Putusan menurut penjelasan Pasal 60 adalah: keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Lazimnya gugatan yang bersifat sengketa atau yang mengandung sengketa disebut

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 306-307.

¹¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (cet. Ke 14; Jakarta: PT Raja Grafindo, Juli, 2010), h. 214.

gugat contentiosa. Dari gugat contentiosa menurut penjelasan pasal 60, diproduksi penyelesaian atau settlement yang berbentuk putusan.

4. Asas Putusan Pengadilan Agama

Suatu putusan mempunyai beberapa asas, pembahasan diawali mengenai asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman). Asas dalam putusan yaitu:

- a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (insufficient judgement)¹².

- b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan.

Asas kedua, digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya¹³.

- c. Diucapkan di muka umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial* (pemeriksaan sidang harus berdasarkan proses yang

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 797.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 800.

jujur sejak awal sampai akhir)¹⁴. Melalui prinsip terbuka untuk umum, dianggap memiliki efek pencegahan (deterrent effect) terjadinya proses peradilan yang bersifat berat sebelah (partial) atau *diskriminatif*, dan hakim bertindak sewenang-wenang¹⁵.

5. Kekuatan Suatu Putusan

a. Kekuatan Mengikat

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (kracht van gewijsde, power in force) tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah mempunyai kekuatan pasti bersifat mengikat (bindende kracht, binding force)¹⁶.

b. Kekuatan pembuktian

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti (bewijs, evidence) oleh pihak-pihak yang berperkara, sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan itu. Karena putusan hakim itu membentuk secara konkret (concreto) maka peristiwa yang ditetapkan itu dianggap benar, sehingga memperoleh bukti sempurna yang berlaku baik antara pihak-pihak yang berperkara, maupun pihak yang ketiga¹⁷.

c. Kekuatan eksekutorial

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (executoriole kracht, executonary power). Bagi pihak yang dinyatakan kalah

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 803.

¹⁵ Zaenal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 353.

¹⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 309.

¹⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 310.

berkewajiban melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Oleh karena itu, putusan Pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, dan apa yang menjadi putusan hakim dapat dilaksanakan dengan paksa oleh aparat negara yang berwenang untuk itu, sekalipun pihak yang dikalahkan tidak dengan rela melepaskannya¹⁸.

B. Tinjauan tentang Hakim Pengadilan

Hakim menurut ketentuan pasal 19 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Istilah pejabat disini dipakai untuk menegaskan status hukum hakim sebagai pejabat negara. Oleh karenanya tidak boleh diberlakukan seperti pegawai negeri pada umumnya. Dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 disebut: Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu wajar apabila undang-undang menentukan syarat pengangkatan, pemberhentian serta sumpah dengan jabatan tersebut¹⁹.

Ada tiga tahapan yang harus dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan, yakni sebagai berikut²⁰:

a. Tahap Mengkonstatir

pada tahap ini, hakim mengkonstatir atau melihat untuk menentukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepada hakim. Untuk memastikan hal tersebut, maka diperlukan pembuktian, dan oleh karena itu hakim harus bersandarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Alat bukti dalam

¹⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 234.

¹⁹ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, h. 117.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1991), h. 92.

perkara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg. Menurut pasal tersebut alat bukti terdiri dari bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

b. Tahap Mengkualifikasi

Pada tahap ini hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa konkret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu, termasuk hubungan hukum apa atau hubungan yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain mengkualifisir berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum.

Jika peristiwanya sudah terbukti dan peraturan hukumnya jelas dan tegas, maka penerapan hukumnya akan mudah, tetapi jika hukumnya tidak jelas atau tidak tegas hukumnya, maka hakim bukan lagi harus menemukan hukumnya saja, tetapi lebih daripada itu hakim harus menciptakan hukum, yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan keseluruhan sistem hukum perundang-undangan dan memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat.

c. Tahap Mengkonstituir

Pada tahap ini, hakim menetapkan hukumnya pada peristiwa tersebut dan memberi keadilan pada para pihak yang bersangkutan. Keadilan yang diputuskan oleh hakim bukanlah produk dari intelektualitas hakim, tetapi merupakan semangat hakim itu sendiri.

Landasan Yuridis dan Filosofis putusan hakim terdapat di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu hakim sebagai unsur inti dari sumber daya manusia yang menjalankan atau memutus suatu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi

kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian Peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara²¹. Hakim Indonesia harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung aura nilai Pancasila dan aura nilai Konstitusi Dasar dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai Filosofis tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

C. Tinjauan tentang Hibah

1. Pengertian hibah

Hibah merupakan bahasa Arab yang telah disadur ke dalam bahasa Indonesia. hibah dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu pada orang lain²². Sedangkan dalam bahasa Arab, hibah merupakan bentuk jadian dari *fi'l al-madli wahabah-yahibuh* di mana akar lafalnya terdiri dari kata *wahaba* yang artinya adalah pemberian yang sepi dari imbalan dan tujuan. Al-Jurjani mengatakan bahwa hibah secara etimologi adalah *al-tabarru'*/sedekah atau darma, sedangkan secara termonologi adalah memilikikan suatu materi tanpa ada unsur imbalan²³.

Menurut kompilasi hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171:g mendefinisikan hibah sebagai berikut: “hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan

²¹ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Kencana Prenata Pratama, 2012), h. 305

²² Departemen Pendidikan RI, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 520.

²³ Abdul Gaffar M.Th.I, *Hibah Dalam Perspektif Hadis Nabi, Kajian Tematik Terhadap Alternatif Pembagian Harta* (cet ke I; Samata-Gowa: Alauddin University Press, 2013), h. 11.

tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”²⁴. Pemberian hibah seseorang atas harta milik biasanya terhadap penyerahan, maksudnya adalah usaha penyerahan sesuatu kepada orang lain dan usaha-usaha dibatasi oleh sifat yang menjelaskan hakekat itu sendiri.

Setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun, berakal sehat dan tidak adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari hartanya kepada orang lain atau kepada suatu lembaga untuk dimiliki. Hibah harus dilakukan dihadapan dua orang saksi dan harta yang dihibahkan itu haruslah barang-barang milik pribadi orang yang memberi hibah. Warga yang berada diluar negeri dapat memberikan hibah kepada orang yang dikehendakinya dengan surat hibah yang dibuat dihadapan Konsulat atau Kedutaan Besar Republik Indonesia ditempat orang yang memberi hibah bertempat tinggal. Surat itu dapat dibenarkan sepanjang isinya tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia²⁵.

Ketentuan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya yang dilaksanakan di Hotel Kartika Chandra Jakarta pada Tanggal 2 sampai 5 februari 1988. Kemudian Kompilasi Hukum Islam ini diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk disebarluaskan sengketa perkawinan, hibah dan sedekah bagi umat islam supaya berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Nomor 154 Tahun 1991 sebagai pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (cet ke I; jakarta: Akademika Pressinda, 1992), h. 156.

²⁵ Abdul Manan, *Aneka Permasalahan Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 144.

Hukum Islam kepada seluruh Instansi pemerintah dan masyarakat baik melalui orientasi penataran maupun dengan penyuluhan hukum.

Menurut beberapa mazhab hibah diartikan sebagai berikut²⁶:

- a. Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti, pemberian ini dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi (menurut madzhab Hanafi).
- b. Memberikan hak sesuatu materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. Hibah menurut madzhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata untuk meminta ridha Allah megharapkan pahalanya. Menurut madzhab Maliki ini dinamakan sedekah.
- c. Pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qobul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapat pahala dari Allah karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya. (menurut madzhab Syafi'i).

Kemudian Imam syafi'i memberikan beberapa pengertian khusus dan pengertian umum tentang Hibah sebagai berikut²⁷:

- a. Memberikan Hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada suatu syarat harus mendapat imbalan ganti, pemberian dilakukan pada saat pemberi

²⁶ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, 1994, h. 145-146.

²⁷ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 116.

masih hidup, benda yang dimiliki yang akan diberikan itu adalah sah milik pemberi.

- b. Memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan/ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberi (mauhublah) Artinya, pemberi hibah hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah. Hibah dalam arti umum dapat diartikan sebagai sedekah.

Hibah dalam hukum adat dikenal dengan “beri-memberi” be-ulah be-atei (berkarya hati) yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih, harga menghargai, tanda ingat, tanda hormat, tanda terima kasih, tanda akrab, tanda perhatian dan sebagainya. Beri-memberi ini dapat dilakukan dengan objek yang berupa barang ringan atau barang berat. Barang ringan adalah barang-barang yang nilai harganya rendah, sedangkan barang berat adalah barang-barang yang bernilai tinggi²⁸.

Misalnya barang ringan adalah uang belanja, bahan makanan, pakaian, perhiasan, alat rumah dan lain-lain. Menjadi adat kebiasaan anggota masyarakat untuk menyampaikan buah tangan ketika bertemu dengan kenalan. Pada umumnya karya budi perseorangan ini tidak mengharapkan adanya balasan yang langsung, namun sekedar menunjukkan harga diri, agar dipuji dan tahu adat.

Untuk beri-memberi barang berat, misalnya tanah, dapat terjadi dalam hubungan kekerabatan atau dikarenakan balas budi dalam hubungan ketetanggaan atau persahabatan yang segala sesuatunya dijiwai oleh rasa kekeluargaan. Tidak semua barang berat dapat diberikan kepada orang lain. Harta pusaka keturunan,

²⁸ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perjanjian Adat*. (Bandung: Alumni, 1979), h.70.

harta benda alat perlengkapan adat, dan gelar-gelar kepemimpinan adat tidak dapat diberikan kepada seseorang yang tidak pada tempatnya²⁹.

Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah dirumuskan sebagai berikut :
 “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”³⁰. Hibah hanyalah dapat berupa benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUH Perdata). Dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut:

- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan Cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
- b. Dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- c. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- d. Hibah tidak dapat ditarik kembali.
- e. Penghibah harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- f. Pelaksanaan daripada penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.
- g. Hibah dapat dilakukan dengan akta notaris.

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia* (yogyakarta: Gadjah Madah University Press, Oktober, 2010), h. 61.

³⁰ Subekti, R. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), h. 436.

Proses penghibahan harus melalui akta Notaris yang aslinya disimpan oleh Notaris bersangkutan. Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa kepada orang lain.

Menurut ketentuan pasal 1668 KUH Perdata pada dasarnya suatu hibah tidak dapat ditarik kembali atau dihapuskan, kecuali apabila:

- a. Tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah telah dilakukan
- b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah.
- c. Apabila si penerima hibah menolak untuk memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah si penghibah jatuh dalam kemiskinan.

Menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyangkut persoalan hak memiliki suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak serta hak-hak yang bersifat sementara telah dijelaskan dalam Undang-undang sebagaimana disebut dalam Pasal 53 UUPA.

Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain di atas bidang tanah hak milik yang sebelumnya dimilikinya (dapat berupa hak guna bangunan atau hak pakai, dengan pengecualian hak guna usaha), yang hampir sama dengan kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk memberikan hak atas tanah kepada warganya. Hak ini, meskipun tidak mutlak sama, tetapi dapat dikatakan mirip dengan egendom atas tanah menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memberikan kewenangan yang paling luas pada pemiliknya, dengan ketentuan harus memperhatikan ketentuan pasal 6 Undang-undang Pokok

Agraria yang menyatakan Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Dari ketentuan selanjutnya mengenai hak milik yang diatur dalam Undang-undang pokok agraria, pasal 21 yang menyatakan bahwa³¹:

- a. Hanya warga Indonesia yang mempunyai hak milik.
- b. Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan Hukum dan syarat-syaratnya.
- c. Orang-orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut terhapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
- d. Selama seseorang disamping kewarganegaraan indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan bagiannya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.

Jadi, dengan pengertian lain hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Proses penghibahan harus melalui akta Notaris yang aslinya disimpan oleh Notaris bersangkutan. Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata – kata yang tegas telah

³¹ Republik Indonesia, Instruksi Presiden R.I, No. I Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama R.I, 2000), h. 95.

dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik yang telah diberi kuasa kepada orang lain.

2. Dasar Hukum Hibah

Dalam al-Quran, penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugrah Allah kepada utusan-utusannya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya, terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah Yang Maha Memberi Karunia³². Untuk itu mencari dasar hukum tentang hibah dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum, agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain. Misalnya, QS. Al-Baqarah, ayat 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaannya penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati³³.

Al-Quran banyak sekali menggunakan istilah yang konotasinya menganjurkan agar manusia yang telah dikaruniai rezeki itu mengeluarkan sebagiannya kepada orang lain. Dari kata nafkah, zakat, hibah, sadaqah, wakaf hingga wasiat. Kendati istilah-istilah tersebut memiliki ciri-ciri khas yang berbeda, kesamaannya adalah bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, h. 467.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 44

3. Rukun dan Syarat-syarat Hibah

Hibah dalam Ensiklopedi Islam, para fukaha (ahli fikih) mendefinisikannya sebagai akad yang mengandung penyerahan hak milik seseorang kepada orang lain semasa hidupnya tanpa ganti rugi.

Disebutkan pula, meskipun hibah merupakan akad yang sifatnya untuk mempererat silaturahmi antara sesama manusia, namun sebagai tindakan hukum, hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, baik oleh yang memberikan maupun oleh yang menerima hibah. Akibatnya, jika salah satu rukun atau syarat hibah tidak terpenuhi, maka hibah tersebut menjadi tidak sah.

Ada beberapa rukun hibah yaitu:

- a. Ada ijab dan Kabul yang menunjukkan ada pemindahan hak milik seseorang (yang menghibahkan) kepada orang lain (yang menerima hibah).

Bentuk ijab bisa dari orang yang menerima hadiah, karena kabul itu termasuk rukun. Sedangkan bagi segolongan ulama Mazhab Hanafi, kabul bukan termasuk rukun hibah. Dengan demikian, *sigat* (bentuk) hibah itu cukup dengan ijab (pernyataan pemberian) saja.

- b. Ada orang yang menghibahkan dan yang akan menerima hibah. Untuk itu, disyaratkan bahwa yang diserahkan itu benar-benar milik penghibah secara sempurna dan penghibah harus orang yang cakap untuk bertindak menurut hukum. Oleh karena itu, harta orang lain tidak boleh dihibahkan. Demikian pula hibah orang gila atau anak kecil. Syarat lain yang penting bagi penghibah adalah bahwa tindakan hukum itu dilakukan atas kesadaran sendiri, bukan karena ada paksaan dari pihak luar.

- c. Ada harta yang akan dihibahkan, dengan syarat harta itu milik penghibah secara sempurna (tidak bercampur dengan milik orang lain) dan merupakan harta yang bermanfaat serta diakui agama.

Dengan demikian, jika harta yang akan dihibahkan tidak ada, harta tersebut masih dalam khayalan atau harta yang dihibahkan itu adalah benda-benda yang materinya diharamkan agama, maka hibah tersebut tidak sah.

hibah dapat dilaksanakan dan dianggap sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut³⁴:

a. Syarat-syarat bagi penghibah

1. Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah; dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
2. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.
3. Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal).
4. Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.

b. Syarat-syarat bagi penerima hibah

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir, tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, dewasa.

³⁴ Suharwadi Chairiumam Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 35.

Dalam hal ini berarti setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimana pun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.

c. Sedang objek yang dihibahkan disyaratkan:

1. Benar-benar ada
2. Harta yang bernilai
3. Dapat dimiliki zatnya, yakni apa yang biasanya dimiliki diterima peredarannya dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.
4. Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah dan wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
5. Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum.

Namun Imam Malik, Asy Syafi'I, Ahmad, dan Abu Tsaur tidak menyaratkan demikian, dan menurutnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi itu sah³⁵.

Syarat barang yang dihibahkan hendaklah barang yang dapat dijual, kecuali³⁶:

- a. Barang-barang yang kecil seperti dua-tiga biji beras, tidak sah dijual tapi sah di berikan.
- b. Barang yang tidak diketahui tidak sah dijual, tetapi sah diberikan.
- c. Kulit bangkai sebelum disamak tidak sah dijual, tetapi sah diberikan.

³⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan prinsip Syariah Dalam Hukum Islam* (Cet. Ke I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 359.

³⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: SinarBaru, 1992), h. 306

D. Tinjauan tentang Ahli Waris

1. Kelompok Utama Ahli Waris Menurut Hukum Islam

Ahli waris adalah orang atau orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia³⁷. Ahli waris ada dua macam, pertama ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Kedua, ahli waris sababiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu suatu sebab pernikahan dan memerdekakan budak, atau menurut sebagian mazhab hanafiyah, karena sebab perjanjian (janji setia)³⁸.

Adapun pembagian warisan terhadap ahli waris menurut Ahmad Rofiq (2003) yang telah dicantumkan dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam di Indonesia, yaitu:

a. Ahli waris nasabiyah

Bagian warisan ahli waris nasabiyah dapat dibedakan dari bentuk penerimaannya menjadi dua. Pertama, *ashab al-furud al-muqaddarah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu yang telah ditentukan Al-Quran. Mereka ini umumnya ahli waris perempuan. Kedua, *ashabal-usubah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah diambil oleh *ashab al-furud al-muqaddarah*. Ahli waris penerima sisa kebanyakan ahli waris laki-laki³⁹.

b. Ahli waris sababiyah

Ahli waris sababiyah semuanya menerima bagian *furud al-muqaddarah* sebagai berikut:

³⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Cet. Ke 19; Jkarta: Rajawali Pers, 2013), h. 309.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, h. 383.

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, h. 407.

Suami, menerima:

- $\frac{1}{2}$ bila tidak ada anak atau cucu,
- $\frac{1}{4}$ bila ada anak atau cucu.

Isteri menerima bagian:

- $\frac{1}{4}$ bila tidak ada anak atau cucu,
- $\frac{1}{8}$ bila ada anak atau cucu.

Bagian suami atau isteri (duda atau janda) dijelaskan dalam pasal 179 dan 180 KHI:

Pasal 179:

Duda mendapat separuh bagian bila pewarisan tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180:

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Sedangkan menurut kewarisan bilateral, ahli waris terdiri dari tiga kelompok. Mereka terlihat dari garis hukum yaitu⁴⁰:

a. Dzu al-fara'idl

Dzu al-fara'idl ialah ahli waris yang dapat bagian waris tertentu dalam keadaan tertentu, di dalam Al-qur'an menjelaskan siapa saja yang termasuk, diantaranya adalah:

1. Anak perempuan yang tidak didampingi laki-laki.
2. Ibu
3. Bapak dalam hal ada anak

⁴⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan di Indonesia* (cet. Ke 7; Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 72.

4. Duda
5. Janda saudara laki-laki dalam hal kalalah
6. Saudara laki-laki dan perempuan bergabung dan bersyirkah dalam hal kalalah
7. Saudara perempuan dalam hal kalalah
- b. Dzu al-qurabat

Dzu al-qurabat ialah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tentu jumlahnya atau disebut juga memperoleh bagian terbuka atau disebut juga memperoleh bagian sisa, dalam hal ini diantaranya adalah:

1. Anak laki-laki
2. Anak perempuan yang didampingi anak laki-laki
3. Bapak
4. Saudara laki-laki dalam hal kalalah
5. Saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah.
- c. Mawali

Mawali ialah ahli waris pengganti. Yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk mendapatkan bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang tadi yang digantikannya itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikannya itu adalah orang yang seharusnya mendapatkan warisan jikalau dia masih hidup.

2. Syarat Menjadi Ahli Waris

Menurut Hukum Kewarisan Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dapat menjadi ahli waris. Penyebabnya adalah⁴¹:

- a. Hubungan darah dan hubungan kekerabatan atau hubungan nasab.

⁴¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, h. 310-311.

b. Hubungan perkawinan.

Hubungan darah adalah:

1. Ke bawah: anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan serta keturunannya.
2. Ke atas: orang tua, baik ibu maupun ayah dan yang menurunkannya.
3. Ke samping anak ayah atau anak ibu atau anak kakek atau nenek, sambung menyambung satu dengan yang lain yang menentukan jarak dekatnya hubungan masing-masing para pewaris yang telah terinci dalam uraian di atas.

Hubungan perkawinan merupakan penyebab seseorang menjadi ahli waris, yang termasuk dalam kelompok ini adalah suami istri, menurut Hukum Islam, karena itu, suami istri saling mewarisi.

Di samping sebab-sebab tersebut di atas yang memungkinkan seseorang menjadi ahli waris, ada sebab-sebab yang menghalangi orang menjadi ahli waris. Sebab yang menjadi penghalang orang menjadi ahli waris adalah:

1. Pembunuhan yang dilakukan oleh calon ahli waris terhadap calon pewaris.
2. Perbedaan agama. Ini berarti seorang muslim atau muslimat tidak bisa menjadi ahli waris seorang yang non muslim. Sebaliknya, seorang yang bukan muslim tidak dapat, mewarisi harta peninggalan seorang muslim atau muslimat.
3. Karena kelompok keutamaan dan hijab. Dalam sistem kewarisan Islam dipakai prinsip keutamaan yang menentukan jarak dekatnya seseorang dengan pewaris. Dalam kelompok pertama bergabung anak-anak pewaris dan orang tuanya. Di kelompok kedua, bergabung saudara-saudara pewaris. Hubungan pewaris dengan anak-anak dan kedua orang

tuanya, menurut hukum Islam, lebih dekat dibandingkan hubungan pewaris dengan saudara-saudaranya, hubungan pewaris dengan anaknya lebih dekat daripada dengan cucunya. Selain karena kelompok keutamaan itu, seseorang mungkin juga terhalang menjadi ahli waris karena terhibab. Menurut istilah Hukum Kewarisan Islam, hibab artinya menutup, melindungi, menghalangi seseorang menjadi ahli waris karena ahli waris lain yang lebih utama yang lebih berhak menerima harta peninggalan. Misalnya, cucu terhibab oleh anak, nenek oleh ibu dan sebagainya.

3. Tidak Pantas Menjadi Ahli Waris

Dari berbagai pandangan hukum, baik Hukum Adat, Hukum Islam maupun didalam *Burgerlijk Wetboek*, pada dasarnya setiap ahli waris berhak atas bagian harta dari si pewaris, namun dalam hal-hal tertentu ia dapat dinyatakan tidak pantas menjadi ahli waris. Dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) hal ini secara jelas diatur dalam pasal 838 KUH Perdata yang menyebutkan tentang siapa-siapa yang tidak pantas menjadi ahli waris yang dianggap tak patut menjadi ahli waris atau dikecualikan dari pewaris ialah sebagai berikut⁴²:

- a. Mereka yang telah dihukum karena di persalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal. Pengaduan mana telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.

⁴² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat* (EdisiRevisi; Jakarta: SinarGrafika, 2010), h. 78-79.

- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

4. Hubungannya Dengan Hukum Waris Nasional

Di Indonesia belum ada suatu kesatuan hukum tentang waris yang dapat diterapkan untuk seluruh warga negaranya. Oleh karena itu, hukum waris yang diterapkan bagi seluruh warga negara Indonesia masih berbeda-beda mengingat adanya penggolongan Warga Negara.

- a. Bagi warga negara golongan Indonesia asli, pada prinsipnya berlaku hukum adat, yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah.
- b. Bagi warga Negara golongan Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah, berlaku hukum Islam yang sangat berpengaruh padanya.
- c. Bagi orang Arab umumnya, berlaku hukum Islam secara keseluruhan.
- d. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa, berlaku hukum Waris dan Burgerlijk Wetbook⁴³.

⁴³ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 16.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yaitu merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian normatif yaitu penelitian dengan menggunakan norma-norma atau produk-produk yuridis seperti peraturan perundang-undangan dan hukum Islam (syariah). Pendekatan syar'i yaitu suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan peraturan yang sesuai dengan Al-quran dan hadis sedangkan penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Penulis berusaha menyusun dan menganalisis secara deskriptif sehingga mendapatkan hasil berupa gambaran yang dapat melukiskan keadaan objek masalah yang diteliti.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis, yuridis, teologis dan syar'i. Dalam hal ini dimaksud untuk melihat pada taraf implementasinya di lapangan

dimana dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

C. Sumber Data

Dalam penelitian penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder:

1. Bahan hukum primer meliputi
 - a. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa
 - b. Dokumen hasil observasi di lapangan berupa akta hibah dan sertifikat Hak milik atas tanah
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang menjadi sumber hukum terkait dengan hibah dan warisan, serta Putusan Pengadilan yakni:
 - a. Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor Perkara 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)
 - c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - e. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - f. Al-Quran dan Terjemahannya

- g. Intruksi Presiden RI, No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
 - h. Al-hadist
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder atau disebut juga bahan penunjang. Dalam penelitian ini, yang berfungsi sebagai bahan hukum tersier adalah:
- a. Kamus Hukum
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - c. Kamus Inggris-Indonesia

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data menggunakan dua cara sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan atau dokumentasi

Yakni pengumpulan data dengan teknik dokumentasi berarti penulis melakukan pencarian dan mengambil segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.

2. Wawancara mendalam

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara sangat tepat untuk memperoleh informasi lebih detail terhadap objek yang diteliti

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian dengan maksud untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

E. Instrument Penelitian

Instrument penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah:

1. Pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan
2. Alat tulis yaitu ballpoint dan kertas
3. Alat rekam

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik pengolahan data
 - a. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan tes untuk mendapatkan data yang diperlukan.

- b. Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data kasar yang muncul dari hasil catatan-catatan pengamatan di lapangan.

- c. Penyajian data

Penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Verifikasi

Verifikasi adalah suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta responden yang telah terjaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan oleh peneliti.

2. Teknik analisis data

Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan sesuai dengan masalah yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam menguji data dan materi yang disajikan, digunakan metode sebagai berikut:

1. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum.
2. Deduktif yang pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Peradilan Agama di Indonesia

1. Pengertian Pengadilan Agama

Peradilan agama adalah terjemahan dari kata-kata bahasa Belanda *Godsdientige rechispraak*. *Godsdientige* berarti ibadah atau agama, *rechispraak* berarti peradilan, yaitu daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan dalam lembaga tertentu dalam pengadilan⁴⁴.

Pengadilan Agama di Indonesia sebenarnya merupakan Institusi yang cukup tua usianya. Lebih tua dari Departemen Agama sendiri bahkan lebih tua dari usia negara kita. Kehadirannya sudah ada sejak munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Bumi Nusantara ini. Peradilan ini muncul bersamaan dengan berdirinya kerajaan Samudera Pasei, Aceh, Demak, Mataram, Cirebon, dan lain-lain⁴⁵.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama yang ada di Indonesia adalah beraneka nama dan dikategorikan sebagai peradilan kuasai, karena berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka semua putusan Pengadilan Agama harus dikukuhkan oleh Peradilan Umum. Ketentuan ini membuat Pengadilan Agama secara *de facto* lebih rendah kedudukannya dari pada Peradilan Umum. Padahal secara yuridis formil dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-

⁴⁴ Zainih Ahmad Noeh, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 15.

⁴⁵ Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), h. 91.

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa ada empat lingkungan Peradilan di Indonesia, yaitu⁴⁶:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Ketentuan di atas menegaskan, bahwa ada empat lingkungan Peradilan yang setara di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pernyataan kesetaraan empat lingkungan Peradilan yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya Peradilan Agama, merupakan koreksi terhadap ketentuan yang terdapat dalam staatblad 1882 Nomor 152 dan staatblad 1937 Nomor 166 dan 610 tentang Peraturan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, staatblad 1937 Nomor 639 tentang Peraturan Kerapatan Qadi dan Qadi Besar untuk sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura (Iemabaran Negara Tahun 1957 Nomor 99) yang telah menempatkan Peradilan Agama berada di bawah Peradilan Umum⁴⁷.

2. Kewenangan Peradilan Agama

Kata “kekuasaan” disini sering disebut juga dengan “kompetensi”. Yang berasal dari bahasa Belanda “*competentie*”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “wewenang”. Sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Bicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara

⁴⁶ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 14.

⁴⁷ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Peraktik pada Peradilan agama* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), h. 2.

Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan relatif” dan Kekuasaan Absolut”. Sekaligus dibicarakan pula didalamnya tentang mengajukannya gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan.

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang Relatif dan wewenang absolut. Wewenang Relatif Peradilan Agama pada Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 RB.g jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang Absolut berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 . Yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara Perdata-bidang Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Islam⁴⁸.

3. Beracara di Pengadilan Agama

Yang dimaksud dengan beracara adalah pelaksanaan tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Sudikno Mertokusumo menuliskan bahwa hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil⁴⁹. Dalam tuntutan hak baik yang mengandung sengketa

⁴⁸ Ibrahim Ahmad Harun, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Edisi Revisi; Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013),h. 66.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 28

maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, penyelesaiannya diserahkan kepada pihak pengadilan dimaksudkan selain untuk mendapatkan keabsahan tentang hak yang dipunyai oleh salah satu pihak atau lebih, juga untuk mendapat hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain beracara dapat diartikan sebagai upaya memberi kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak yang berperkara secara formil, artinya terbatas pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan⁵⁰.

Pada bidang hukum acara peradilan agama, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang tidak menyimpang dari Syariah Islam, kewajiban tersebut dilakukan apabila sudah tidak ditemukan lagi dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Adapun Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama, diantaranya adalah:

- a. HIR (Herziene Indonesische Reglement) untuk Jawa dan Madura
- b. R.Bg (Rechtsreglement Voor de Buitengewesten) untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada diluar Jawa dan Madura yang berperkara di muka Lendraad (Pengadilan)⁵¹.
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- d. Undang-undng Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

⁵⁰ Shopar Maru Hutagalung, *Praktit Peradilan Perdata Teknis Mengenai Perkara Di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 81.

⁵¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000) h. 6

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

- e. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- h. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- i. Yurisprudensi.
- j. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan surat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
- k. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Peradilan Agama⁵².

Pengadilan Agama adalah Peradilan negara yang kewenangan absolutnya adalah menyelesaikan, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq sedekah dan ekonomi syariah. Dengan demikian dapat disimpulkan, pengertian Hukum Acara Perdata Peradilan Agama adalah seperangkat peraturan yang mengatur tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka hakim Pengadilan Agama.

B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungguminasa

1. Letak Geografis

Awal pendirian Pengadilan Agama Sungguminasa beralamat di Jalan Andi Mallombassarang No. 57 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan pada tahun 2009 berpindah ke Jalan Masjid Raya No. 25

⁵² Ibrahim Ahmad Harun, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Edisi Revisi; Jakarta: Mahkamah Agung, 2013), h. 66.

dan menempati gedung baru yang sesuai dengan prototype: Mahkamah Agung. Waktu yang ditempuh dari Kota Makassar menuju PA. Sungguminasa \pm Menit dan \pm 5 Menit dari Kantor Bupati Gowa dan Lapangan Syekh Yusuf. Secara Geografis, PA. Sungguminasa memiliki letak astronomis $5^{\circ}11'55.6''$ LS - $119^{\circ}27'11.3''$ BT dan juga memiliki batas-batas wilayah, yaitu:

- a. Utara: Kota Makassar
- b. Selatan: Kecamatan Palangga dan Kecamatan Bontorannu
- c. Timur: Kecamatan Patalassang
- d. Barat: Kecamatan Palangga

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang kewenangan Peradilan Agama adalah memeriksa, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.

Disamping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Sungguminasa, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (judicial power)

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- b. Fungsi pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

c. Fungsi pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

d. Fungsi nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

e. Fungsi administratif

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

3. Visi dan Misi

Adapun Visi PA. Sungguminasa adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan lembaga yang memberikan jaminan kepastian bagi penyelenggaraan peradilan dan pelayanan”.

Visi PA.Sungguminasa di atas diharapkan dapat memotivasi seluruh pegawai PA. Sungguminasa dalam melaksanakan aktivitas. PA. Sungguminasa menginginkan dirinya menjadi suatu “lembaga” yang dapat memberikan

“jaminan” bagi pencari keadilan, baik dari sisi pelayanan maupun penyelenggaraan proses peradilan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan termasuk kinerja sumber daya manusia, sarana prasarananya mempunyai sistem yang diterapkan sesuai dengan tugas yang diemban dari MA itu sendiri, sehingga keberadaannya selalu diperhitungkan, disenangi bahkan dapat menjadi solusi bagi semua pihak. Keinginannya menjadi sebuah institusi yang berkualitas membuatnya dapat disejajarkan bersama dengan institusi lainnya dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik tentunya mempunyai konsekuensi yang cukup berat dan cukup menantang bagi perwujudan dari rasa keinginan tersebut. Keinginan yang besar ini akan diiringi dengan misi yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan visi PA. Sungguminasa yang telah ditetapkan tersebut, maka beberapa misi PA. Sungguminasa sebagai perwujudan dari misi MA, diantaranya yaitu:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa
- b. Memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan
- c. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa
- d. Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbasis teknologi informasi.

C. Hal-hal yang Mendasari Keterkaitan Hukum Hibah Dan Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Islam

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di dalam Bab II tentang pengertian hibah bahwa, Hibah merupakan bahasa Arab yang telah disadur ke dalam bahasa Indonesia. hibah dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu pada orang lain.

Sedangkan dalam bahasa Arab, hibah merupakan bentuk jadian dari fi'l al-madli wahabah-yahibuh di mana akar lafalnya terdiri dari kata wahaba yang artinya adalah pemberian yang sepi dari imbalan dan tujuan. Al-Jurjani mengatakan bahwa hibah secara etimologi adalah al-tabarru'/sedekah atau darma, sedangkan secara termonologi adalah memilikkan suatu materi tanpa ada unsur imbalan. Kemudian mengenai waris, Pengertian waris timbul karena adanya kematian yang terjadi pada anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak apabila orang yang meninggal itu mempunyai harta kekayaan. Maka, yang menjadi persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.

Dengan demikian jelas, waris itu disatu sisi berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris dan berakar pada harta kekayaan karena menyangkut waris atas harta yang ditinggalkan oleh Almarhum. Dalam pengertian waris, tersimpul obyek waris, yaitu anggota keluarga yang meninggal dan anggota yang ditinggalkannya atau yang diberi wasiat oleh almarhum.

Peristiwa kematian yang menjadi penyebab timbulnya pewaris kepada ahli waris. Obyek waris adalah harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Jika dirumuskan, maka Hukum Waris adalah peristiwa hukum yang mengatur tentang beralihnya warisan dari peristiwa karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk⁵³.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan hubungan hibah dengan waris terdapat pada Pasal 211, yaitu:

“Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”

⁵³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 266.

Penghibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dalam keadaan tertentu dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hanya dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam tidak memberi patokan secara jelas kapan suatu hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, secara karakteristik dapat dikemukakan di sini beberapa patokan antara lain :

1. Harta yang diwariskan sangat kecil, sehingga hibah yang diterima oleh salah seorang anak, tidak diperhitungkan sebagai warisan dan ahli waris yang lain tidak memperoleh pembagian waris yang berarti.
2. Penerima hibah hartawan dan yang berkecukupan, sedangkan ahli waris yang lain tidak berkecukupan, sehingga penghibah itu memperkaya yang sudah kaya dan memelaratkan yang sudah melarat. oleh karena itu pantas dan layak untuk memperhitungkan sebagai warisan⁵⁴.

Kompilasi hukum islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi perpecahan di antara keluarga. Prinsip yang dianut oleh agama Islam adalah sesuai dengan kultur bahasa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhamad Ibnu Hasan, bahwa orang yang menghibahkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum. Oleh karena orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dianggap batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan⁵⁵.

⁵⁴ Yahya Harahap, *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993), h. 57.

⁵⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 138

Dalam hal ini, bisa dianalisis lebih lanjut, maka Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam memuat aspek urf, karena setelah melihat nas, baik itu Al-Qur'an maupun Hadis, tidak menjumpai nas yang menunjukkan tentang diperhitungkannya hibah kepada orang tua kepada anak sebagai warisan.

Dengan demikian, bahwa ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang hibah orang tua kepada anaknya, dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hibah tersebut merupakan adat kebiasaan yang telah mengakar dan telah diterima oleh masyarakat Indonesia., adat istiadat semacam ini menurut kaidah-kaidah Hukum Islam disebut urf. Yang dimaksud dengan urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Urf disebut juga dengan adat (kebiasaan)⁵⁶.

D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm

Pengadilan Agama berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 1 angka 37 menyatakan bahwa : Ketentuan Pasal 49 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam bidang :

1. Perkawinan
2. Waris

⁵⁶ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh* (Mesir: Dar Al-Ilm, 1978) h. 89.

3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq Shadakoh
8. Ekonomi Syariah

Kewenangan untuk memeriksa dan memutus kasus penarikan/pembatalan akta hibah dalam kasus ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Sungguminasa, khususnya perkara yang diajukan oleh penggugat tertanggal 28 November 2012 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm, yang telah diperbaikinya pada tanggal 5 Februari 2013, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa alm. Bau Patta Bt. Tunru alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2005 di Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar
2. Bahwa alm. Bau Patta Bt. Tunru alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau semasa hidupnya tidak pernah kawin dan mempunyai 4 (empat) saudara kandung yakni :
 - Hj. Andi Gagga binti Tunru Dg. Rani
 - Hj. Andi Bunga Sutra binti Tunru Dg. Rani
 - Hj. Andi Sima binti Tunru Dg. Rani
 - Hj. Andi Fauziah binti Tunru Dg. Rani
3. Bahwa ke 4 (empat) saudara kandung alm. Bau Patta Bt. Tunru alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau diatas, telah meninggal dunia adalah alm. Hj. Andi Sima binti Tunru Dg. Rani pada tanggal 20 februari 2002,

sehingga saudara kandung alm. Bau Patta Bt. Tunru alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau yang masih hidup saat ini adalah 3 (tiga) orang dan merupakan ahli waris dari alm. Bau Patta Bt. Tunru Dg. Rani alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 15 Maret 2005

4. Bahwa alm. Bau Patta Bt. Tunru Dg. Rani alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau selain meninggalkan 3 (tiga) ahli waris, yakni Para penggugat, juga telah meninggalkan sebidang tanah seluas ± 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Tombolo (dahulu Kelurahan Katangka), Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atau yang dikenal dengan Rincik/Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia Persil No. 6 S11 Kohir No. 561 CI atas nama: Bau Patta binti Tunru Dg. Rani. Adapun batas-batas tanah dahulu adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Sawah Milik Tjowe / Ir. Amin
- Sebelah Barat: Batas Persil
- Sebelah Timur: Sawah Milik Tjondeng Bin Baso
- Sebelah Selatan: Sawah Milik Saoda Bt. Manaja

Sedangkan batas-batas, tanah sekarang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Jalan Hertasning Baru
- Sebelah Barat: Tanah Milik Timurama
- Sebelah Timur: Tanah Milik Yenni Nios
- Sebelah Selatan: Tanah Milik Timurama

5. Bahwa tanah peninggalan alm. Bau Patta binti Tunru Dg. Rani alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau diatas seharusnya menjadi warisan dari Para penggugat, namun pada kenyataannya pada tahun 1989, tanah

peninggalan alm. Bau Patta binti Tunru Dg. Rani alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau tersebut dihibahkan seluruhnya oleh orang tuanya yang bernama alm. Haji Andi Tunru kepada alm. Andi Mansyur, sebagaimana dalam Akta Hibah No. 091/KI0/KIK/III/1989 Tanggal 17 Maret 1989, yang dibuat dihadapan Drs. Hyder Hamdjah, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sombo Opu.

6. Bahwa alm. Haji Andi Tunru telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1991. Demikian pula halnya alm. Andi Mansyur telah meninggal dunia pada tahun 2001, dan alm. Andi Mansyur meninggalkan segenap ahli waris yakni tergugat I s/d tergugat XII.
7. Bahwa penghibahan yang dilakukan alm. Haji Andi Tunru kepada alm. Andi Mansyur sebagaimana Akta Hibah diatas adalah sangat merugikan kepentingan hukum/hak Para penggugat sebagai ahli waris karena Para penggugat sama sekali tidak mendapatkan hak sedikitpun atas tanah peninggalan alm. Bau Patta binti Tunru Dg. Rani alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau dimaksud, padahal secara hukum tanah peninggalan tersebut tidak seharusnya dihibahkan seluruhnya.
8. Bahwa dengan adanya hibah yang diberikan alm. Haji Andi Tunru kepada alm. Andi Mansyur, sementara obyek hibah sendiri adalah merupakan harta peninggalan yang belum terbagi antara Para penggugat selaku ahli waris, maka nyatalah bahwa penghibahan kepada alm. Andi Mansyur adalah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hibah itu sendiri karena tanah yang dihibahkan tersebut bukanlah tanah milik sepenuhnya dari penghibah, melainkan tanah milik dari alm. Bau Patta binti Tunru Dg. Rani alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau, yang

berhak diwarisi oleh Para penggugat, sehingga penghibahan itu sendiri merugikan kepentingan hukum/hak Para penggugat sebagai ahli waris.

9. Bahwa dengan adanya kenyataannya ini, maka cukup beralasan dan berdasar hukum apabila penghibahan yang dilakukan alm. Haji Andi Tunru kepada alm. Andi Mansyur sebelumnya sebagaimana dalam Akta Hibah No. 091/K10/KIK/III/19813 Tanggal 17 Maret 1989, yang dibuat dihadapan Drs. Hyder Hamdjah, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sombo Opu, dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
10. Bahwa oleh karena alm. Andi Mansyur telah meninggal dunia dan tanah tersebut dikuasai oleh tergugat I s/d tergugat XII selaku ahli waris dari alm. Andi Mansyur, dimana dasar penguasaan tersebut didasarkan atas akta hibah yang dibuat sebelumnya oleh alm. Haji Andi Tunru kepada alm. Andi Mansyur, maka penguasaan tergugat I s/d tergugat XI tersebut dipandang tidak sah, sehingga secara hukum patut dihukum untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Para penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas tanah tersebut.
11. Bahwa adapun dilibatkannya Kepala Kecamatan Somba Opu Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Turut tergugat dalam perkara ini karena Akta Hibah No. 091/K10/KIK/III/1989 Tanggal 17 Maret 1989 dibuat dihadapan Kepala Kecamatan Somba Opu.
12. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian lebih besar, yang dapat diderita Para penggugat, kiranya mohon Ketua/Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas tanah seluas ± 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Tombolo (dahulu Kelurahan Katangka), Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atau yang

dikenal dengan Rincik/Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia Persil No. 6 SII Kohir No. 561 CI atas nama : Bau Patta binti Tunru Dg. Rani, dengan tujuan untuk menghindari tanah tersebut dialihkan dan atau dipindah tangankan, baik secara diam-diam maupun terang-terangan kepada pihak lain.

13. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan bukti-bukti othentik, yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvobaab bij vorrad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Para penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Menyatakan bahwa alm. Bau Patta binti Tunru Dg. Rani alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau telah meninggal dunia pada tanggal 6 Febuari 2005 di Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan meninggalkan 4 (empat) orang saudara kandung sebagai ahli waris, yakni:
 - Hj. Andi Gagga Binti Tunru Dg. Rani
 - Hj. Andi Bunga Sutra Binti Tunru Dg. Rani
 - Hj. Andi Sima binti Tunru Dg. Rani
 - Hj. Andi Fauziah Binti Tunru Dg. Rani
4. Menyatakan bahwa alm. Hj. Andi Sima binti Tunru Dg. Rani telah meninggal dunia pada tanggal 20 Febuari 2005 di Makassar.

5. Menyatakan Para penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Bau Patta binti Tunru Dg. Rani alias Hj. Andi Hafsa Petta Bau berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 15 Maret 2005.
6. Menyatakan tanah seluas ± 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Tombolo (dahulu Kelurahan Katangka), Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atau yang dikenal dengan Rincik/Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia Persil No. 6 SII Kohir No. 561 CI atas nama: Bau Patta binti Tunru Dg. Rani, adalah merupakan harta peninggalan dari alm. Bau Patta binti Tunru Dg. Rani, yang berhak diwarisi oleh Para penggugat sebagai ahli waris.
7. Menyatakan perbuatan alm. Haji Andi Tunru yang telah menghibahkan tanah seluas ± 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Tombolo (dahulu Kelurahan Katangka), Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atau yang dikenal dengan Rincik/Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia Persil No. 6 SII Kohir No. 561 CI atas nama : Bau Patta binti Tunru Dg. Rani kepada alm. Andi Mansyur adalah perbuatan yang sangat merugikan kepentingan hukum/hak Para penggugat.
8. Menyatakan bahwa alm. Haji Andi Tunru telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1991. Demikian pula halnya alm Andi Mansyur telah meninggal dunia pada tahun 2001.
9. Menyatakan Akta Hibah No. 091/K10/KIK/III/1989 Tanggal 17 Maret 1989, yang dibuat dihadapan Drs. Hyder Hamdjah, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sombo Opu antara alm, Haji Andi Tunru kepada Andi Mansyur (alm) adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

10. Menyatakan bahwa penguasaan tergugat I s/d tergugat XI selaku ahli waris dari alm. Andi Mansyur atas tanah seluas ± 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Tombolo (dahulu Kelurahan Katangka), Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atau yang dikenal dengan Rincik/Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia' Persil No. 6 SII Kohir No. 561 CI, adalah tidak sah karena bertentangan dengan hukum yang berlaku.
11. Menyatakan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh alm. Andi Mansyur maupun tergugat I s/d tergugat XI sebagai ahli waris dari alm. Andi Mansyur atas tanah dimaksud diatas adalah tidak sah.
12. Menghukum tergugat I s/d tergugat XI atau siapa saja yang telah mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Para penggugat.
13. Menghukum Turut tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini.
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvorbaab bij voorad), walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
15. Menghukum tergugat I s/d tergugat XI dan Turut tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Kemudian hakim mengemukakan tentang hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan apakah harta yang dihibahkan oleh Haji Andi Tunru tersebut adalah harta milik Bau Patta, sedangkan Bau Patta adalah anak dari Andi Tunru, jika harta tersebut adalah murni milik Bau Patta lalu mengapa Andi Tunru menghibahkan tanah/obyek sengketa kepada Andi Mansyur, sementara itu boleh jadi Andi Tunru tidak memiliki hak sedikitpun atas tanah/obyek sengketa, maka sangatlah dibutuhkan alat-alat bukti yang cukup, akan tetapi pada persidangan tidak ditemukan alat-alat bukti yang mendukung

dalil para penggugat mengenai harta yang telah dihibahkan berupa tanah kohir 561 Persil No. 6 SII yang diterangkan sebagai harta peninggalan Bau Patta kepada 3 orang ahli warisnya (saudaranya), dan diterangkan pula bahwa proses hibah tersebut telah merugikan kepentingan ahli waris Bau Patta, menurut pendapat majelis hakim bahwa sangatlah diperlukan alat bukti lain yang sah untuk menemukan kebenaran obyek yang telah dihibahkan tersebut adalah melawan hak, baik karena pengalihan obyek tersebut dalam bentuk hibah adalah hak sepenuhnya milik orang lain, atau penghibahan tersebut melebihi dari besaran harta maksimal $\frac{1}{3}$ pemberi hibah, atau hibah dilaksanakan tidak sesuai prosedur yang berlaku atau harta yang dihibahkan merupakan harta warisan, dan apabila dihubungkan dengan bukti tertanda T sebagai bukti bawah tangan, yang dinilai hanya membuktikan telah terjadinya proses penghibahan, dan tidak merupakan bukti yang menunjukkan hak kepemilikan penghibahan, dan tidak merupakan bukti yang menunjukkan hak kepemilikan atas hibah, sedangkan para penggugat telah mengajukan bukti P11 yang dipertimbangkan sebagai bukti yang tidak sah sehingga tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan para penggugat, karena itu para penggugat harus dinyatakan tak berhasil membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian dalil gugatan para penggugat patut ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti-bukti penggugat beranda P6 P8 dan P9 dinilai tidak berkaitan langsung dengan obyek sengketa, sehingga bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada persidangan, para penggugat telah diperintahkan oleh majelis hakim untuk menyiapkan biaya yang digunakan untuk sidang pemeriksaan setempat (descente), namun pihak penggugat tidak bersedia menyiapkan dana untuk pemeriksaan setempat dan keberatan untuk dilaksanakan

sidang pemeriksaan setempat dengan alasan bahwa obyek sengketa telah diakui oleh tergugat VIII dihibahkan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan hukum pelaksanaan sidang setempat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 180 RBg ayat 1 adalah dengan tujuan untuk mendapatkan sisi manfaat keterangan tambahan dari pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat.

Mnimbang, bahwa demikian pula sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam perkara ini menegaskan bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (non executable) karena obyek perkara atas barang-barang tidak bergerak tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan Pemeriksaaan Setempat atas obyek perkara, oleh karenanya kepada majelis hakim yang memeriksa perkara perdata diminta untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara yang perlu dilakukan oleh majelis hakim dengan dibantu oleh panitera pengganti baik atas inisiatif hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan tidak adanya kesiapan para penggugat dalam menanggung biaya pemeriksaan setempat dengan adanya keberatan para penggugat untuk dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, sementara itu majelis berusaha untuk menemukan kebenaran formil dan materil terhadap obyek sengketa yang tujuannya untuk menghindari adanya

ketidakpastian hukum atas putusan pengadilan yang mengandung kepastian dan atau putusan pengadilan akan *ilusoir*, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan setempat adalah bagian dari proses pembuktian (di lapangan) yang selanjutnya dengan memperhatikan keberatan para penggugat terhadap pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat maka telah mengindikasikan para penggugat setidaknya menyatakan diri tidak bersedia untuk mengajukan bukti.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya cukup bukti yang kuat dan dinilai dapat mendukung dalil gugatan para penggugat tersebut, maka secara formil harus dinyatakan para penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga dengan demikian harus pula dinyatakan bahwa gugatan para penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena itu pula tuntutan (petitum) para penggugat lainnya poin 14 yang berkaitan dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*) harus pula ditolak.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembebanan biaya perkara, dan karena gugatan para penggugat dinyatakan ditolak, maka para penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 (1) RBg. Para penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

E. Analisis Putusan Hakim

Dalam kasus ini hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan berdasarkan pembuktian selama persidangan. Menurut majelis hakim Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan atas obyek yang disengketakan mengenai harta yang telah dihibahkan berupa tanah kahir 561 Persil No. 6 SII yang diterangkan sebagai harta peninggalan Bau Patta kepada 3 orang ahli warisnya

(saudaranya), dan diterangkan pula bahwa proses hibah tersebut telah merugikan kepentingan ahli waris Bau Patta, menurut pendapat majelis hakim bahwa sangatlah diperlukan alat bukti lain yang sah untuk menemukan kebenaran obyek yang telah dihibahkan tersebut adalah melawan hak, baik karena pengalihan obyek tersebut dalam bentuk hibah adalah hak sepenuhnya milik orang lain, atau penghibahan tersebut melebihi dari besaran harta maksimal 1/3 pemberi hibah sebagaimana yang telah dikatakan oleh Dr. Muhammad Najmi Fahri SH. MH. Selaku hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, bahwa selain dari pada pemberian hibah orang tua kepada anak, hibah yang diberikan secara lebih dari harta maksimal 1/3 pemberi hibah juga dapat ditarik kembali ketika ada pihak yang merasa dirugikan⁵⁷ atau hibah dilaksanakan tidak sesuai prosedur yang berlaku atau harta yang dihibahkan merupakan harta warisan. Karena itu para penggugat harus dinyatakan tak berhasil membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian dalil gugatan para penggugat patut ditolak.

Penulis menganggap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap perkara dengan Nomor 734/Pdt.G/2012/PA/Sgm telah sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Huruf (w) tentang Pembuktian poin 1 dan 2 yaitu:

1. Jika dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka penggugat wajib membuktikan, sedang tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya (Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg).
2. Sesuai dengan Pasal 163 HIR/Pasal 284 RBg ada 5 macam alat-alat bukti, yaitu: Bukti surat, Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.

⁵⁷ Dr. Najmi Fahri SH. MH (Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa), *Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Sungguminasa*, 19 Februari 2018.

Firman Allah dalam QS An-naml Ayat 64

أَمْ مَنْ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَءِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Terjemahnya:

Atau siapakah yang menciptakan (manusia dari permulaannya), kemudian mengulanginya (lagi), dan siapa (pula) yang memberikan rezki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)?. Katakanlah: "Unjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu memang orang-orang yang benar"⁵⁸.

Setiap tuntutan hak atau menolak tuntutan hak harus dibuktikan di muka sidang pengadilan. Dalam pembuktian ini diperlukan alat-alat bukti. Alat bukti adalah alat-alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara di muka sidang pengadilan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran tuntutan atau bantahannya. Alat bukti ini sangat penting artinya bagi para pihak yang berperkara merupakan alat atau sarana untuk meyakinkan kebenaran tuntutan hak penggugat atau menolak tuntutan hak bagi hakim. Dan bagi hakim, alat bukti tersebut dipergunakan sebagai dasar memutus perkara.

Suatu perkara di pengadilan tidak dapat diputus oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian. Dengan kata lain, kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolak gugatan karena tidak ada bukti yang membenarkan. Rasulullah Saw juga pernah bersabda mengenai pembuktian yang harus dihadirkan oleh pihak yang merasa dirugikan:

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 383.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
(حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi harus ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan).

(HR. Baihaqi, hadis hasan sebagian lafadznya ada pada riwayat Bukhari dan Muslim)⁵⁹.

Hadis ini menunjukkan bahwa jika vonis yang ditetapkan untuk pendakwa hanya sekedar menurut dengan dakwaannya saja, maka akan banyak orang yang memanfaatkannya untuk merebut harta orang lain dan mengancam jiwa dan kehormatannya. Dalam hadis ini Rasulullah Saw menjelaskan bahwa pendakwa harus mendatangkan bukti, yaitu jika terdakwa merasa telah dirugikan dan tidak mengakui dakwaan. Adapun jika terdakwa mengakui dakwaan, masalahnya selesai dan pengakuan ini disebut Iqrar. Pendakwa tidak perlu lagi mendatangkan bukti. Seorang hakim harus meminta dari kedua orang yang berperkara sesuatu yang dapat menguatkan pengakuan mereka dan seorang hakim harus berusaha keras untuk mengetahui permasalahan sebenarnya dan menjelaskan hukumnya berdasarkan apa yang tampak baginya.

⁵⁹ Imam An-Nawawi, *Hadits Arba'In An-Nawawi & Terjemahannya* (Cet Ke I; Jakarta Timur: Khatulistiwa pers, 2008), h. 70

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 211 disebutkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, walaupun tidak dijelaskan secara jelas kapan hibah orang tua kepada anak terhitung sebagai warisan, namun Kompilasi hukum islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya sehingga apabila melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki, maka hibah tersebut dapat ditarik kembali dan dihitung sebagai harta warisan.
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa No. 734/Pdt.G/2012/PA/Sgm mengenai Penolakan Perkara Pembatalan Akta Hibah No. 091/K10/KIK/III/1989 telah sesuai dengan praturan perundang-undangan dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan tidak adanya bukti yang menguatkan dalil-dalil penggugat setelah Penggugat mengajukan bukti P11 yang telah dipertimbangkan sebagai bukti yang tidak sah.

B. Implikasi Penelitian

1. Apabila pemberi hibah hendak memberikan hibah kepada seseorang sebaiknya diberitahukan dulu kepada seluruh ahli waris yang lain. Dengan tujuan apabila si pemberi hibah meninggal dunia, tidak terjadi perselisihan terhadap obyek hibah yang telah diberikannya dengan itikad baik kepada penerima hibah.
2. Untuk para penegak hukum diharapkan dapat memberikan putusan dengan seadil-adilnya dengan merujuk pada aturan yang berlaku, agar lembaga Peradilan tetap menjadi panutan oleh rakyat pencari keadilan.

Daftar Pustaka

Manan Abdul, *Aneka Permasalahan Hukum Perdata Islam di Indonesia*

(Jakarta: Prenada Media Group, 2006)

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*

(cet ke I; jakarta: Akademika Pressinda, 1992)

Republik Indonesia, Instruksi Presiden R.I, No. I Tahun 1991, *tentang Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama R.I, 2000)

Shomad Abd, *Hukum Islam, Penormaan prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*

(Cet. Ke I; Jakarta: Kencana, 2010)

Anshori Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*

(yogyakarta: Gadjah Madah University Press, Oktober, 2010)

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*

(Cet. Ke I; Jakarta: PT Rajagarfindo Persada, 2003)

Kusuma Hilman Hadi, *Hukum Perjanjian Adat.*

(Bandung: Alumni, 1979)

Idris Irfan, *prospek peradilan agama sebagai peradilan negara dan peradilan keluarga dalam sistem politik hukum nasional*

(cet ke I; Makassar: Alauddin university press, 2012)

Ramulyo M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*

(Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*

(Cet. Ke 19; Jkarta: Rajawali Pers, 2013)

Harahap M.Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*

(cet. Ke 3; Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Rasyid Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agam*

(cet. ke 14; jakarta: PT Raja Grafindo, juli, 2010)

Thalib Sajuti, *Hukum Kewarisan di Indonesia*

(cet. Ke 7; Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

Soimin Soedharyo, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif HukumPerdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*

(EdisiRevisi; Jakarta: SinarGrafika, 2010)

Subekti, R. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*

(Jakarta: Pradnya Paramita, 2008)

Pasaribu Suharwadi Chairiumam, *Hukum Perjanjian Dalam Islam.*

(Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: SinarBaru, 1992)

Undang-undaang No. 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*

(Surabaya: Karina, 2004)

Noeh Zainih Ahmad, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Indonesia*

(Surabaya: Bina Ilmu, 1980)

Sumber Lain

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007

Republik Indonesia, Instruksi Presiden R.I, No. I Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923

Kampus II Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax. 424836

Nomor : B-322/SH.01/PP.00.9.01/2018

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth : **Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa**

Di

Gowa

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Abdul Gofur

Nim : 10100112012

Fakultas/jurusan : Syariah dan Hukum/HAPK

Semester : XI (Sebelas)

Alamat : BTN Minasa Upa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama tentang Upaya Pembatalan Akta Hibah Atas Tuntutan Ahli Waris (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa No. Perkara 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm)"

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Supardin, M.H.I.

2. Dr. Hj. Patimah, M.Ag

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **Pengadilan Agama Sungguminasa** terhitung mulai tanggal 24 Januari 2018 s/d 12 Februari 2018.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak diucapkan terima kasih



Wassalam

Samata Gowa, 23 Januari 2018

Dekan,

Prof. Dr. Darussalam., M.Ag

NIP. 19621016 19903 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar Di Samata Gowa.

(Sebagai Laporan)



PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

Jl. Masjid Raya No. 25 Telp. (0411) 864298

SUNGGUMINASA

e-mail: pa-sungguminasa@pta-makassarkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W20-A18/343/PB.02/II/2018

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, menerangkan bahwa:

Nama : Abdul Gofur
NIM : 10100112012
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : BTN. Minasa Upa Makassar

telah mengadakan penelitian sebagai salah satu penyelesaian penelitian individual dengan judul: ***"Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Upaya Pembatalan Akta Hibah Atas Tuntutan Ahli Waris (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa No. Perkara 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm)"***.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 20 Februari 2018

Ketua,



Drs. Ahmad Nur ,M.H.

NIP. 19700803 199703 1 002

LAMPIRAN DARI HASIL PENELITIAN



wawancara bersama Dr. Muhammad Najmi Fahri SH. MH., selaku hakim Pengadilan Agama Sungguminasa



Foto Bersama bapak Dr. Muhammad Najmi Fahri SH. MH, selaku hakim Pengadilan Agama Sungguminasa. gambar ini diambil pada saat selesainya proses wawancara

LAMPIRAN DARI HASIL PENELITIAN



RIWAYAT HIDUP



Penyusun Skripsi yang berjudul, “ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG UPAYA PEMBATALAN AKTA HIBAH ATAS TUNTUTAN AHLI WARIS (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminas No. Perkara734/Pdt.G/2012/PA.Sgm) bernama Abdul Gofur, dilahirkan di Manokwari, pada tanggal 21 Januari 1994. Penyusun merupakan anak kedua

dari Tiga bersaudara, buah hati dari Ayahanda Patwa, SH. MH. Ibunda Hj. Buati. Penyusun memulai pendidikan dasar di SDN Yapis Timika dan tamat pada tahun 2006. Seelah itu Penyusun melanjutkan pendidikan di Pondok pesantren Salafiyah Wustha DDI-AD, Mangkoso, Kabupaten Barru tamat pada tahun 2009 dan melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Junaidiyah Biru, kabupaten Bone tamat pada tahun 2012, kemudian penyusun melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan (HAPK) Jurusan Peradilan Hingga Tahun 2018. Pengalaman organisasi Fosmadim (Forum Silaturahmi Mahasiswa Alumni DDI Mangkoso)

ALAUDDIN
MAKASSAR